



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 3 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TINDAK LANJUT HASIL MONITORING DAN EVALUASI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN  
DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
ATAS KETAHANAN PANGAN DALAM MENGANTISIPASI DAMPAK COVID-19 TAHUN  
ANGGARAN 2020 PADA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR DAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sehubungan dengan Laporan Hasil Uji Petik atas Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas Ketahanan Pangan dalam Mengantisipasi Dampak COVID-19 Tahun Anggaran 2020 pada Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor LIM-728/PW 09/2.1/2020 tanggal 20 Oktober 2020, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Direksi Perumda Pasar Jaya

Untuk :

**KESATU** : Lebih meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia selaku pemberi bantuan barang/alat kesehatan dalam mengantisipasi dampak COVID-19, sehingga diketahui penyebab tidak terpenuhinya bantuan ke Pasar Rakyat.

**KEDUA** : Membuat Berita Acara Penerimaan Barang bantuan barang/alat kesehatan dalam mengantisipasi dampak COVID-19 dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, sesuai hasil inventarisasi yang telah dilaksanakan oleh Perumda Pasar Jaya.

**KETIGA** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2021

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta